

## Peningkatan Kapasitas UMKM “Menuju UMKM Yang Bankable”

Dila Angraini<sup>a,1</sup>, Erika Astriani Aprilia<sup>b,2</sup>, Wiwit Setyawati<sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pamulang\*

<sup>1</sup>dosen00879@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen00897@gmail.com, <sup>3</sup>dosen00875@unpam.ac.id

\* Dila Angraini

Email ; dosen00879@unpam.ac.id

---

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bekerjasama dengan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Barat. Tujuan dari dilakukannya kegiatan PKM adalah untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada UMKM binaan BBPKK Bandung Barat tentang pentingnya menjadi UMKM yang bankable agar siap menerima suntikan dana dari Pemerintah atau dalam pengajuan penambahan modal kerja untuk pengembangan skala usaha. Target sasaran dari kegiatan PKM ini adalah para pelaku usaha khususnya UMKM yang telah menjadi binaan BBPKK Bandung Barat dan secara Nasional karena acara diselenggarakan secara online sehingga bisa diakses dari mana saja. Jumlah keseluruhan peserta adalah 62 orang dengan waktu pelaksanaan kegiatan di tanggal 9 Desember 2022. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah penyuluhan atau ceramah, tutorial, diskusi, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan PKM diperoleh data bahwa masih banyak UMKM peserta kegiatan yang tidak belum mencatat, mengadministrasikan dan mengarsipkan legalitas perusahaan dan transaksi keuangan usahanya. Sehingga banyak UMKM belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerja dari Bank. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mulai disiplin dalam hal pencatatan baik pencatatan financial usaha maupun pencatatan legalitas usaha, serta menjaga *track record* perbankan menuju UMKM yang *bankable*.

**Kata kunci:** *UMKM, Bankable*

---

### Abstract

*This community service is in collaboration with Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Barat. The purpose of carrying out PKM activities is to provide understanding and direction to BBPKK Bandung Barat assisted MSMEs about the importance of becoming bankable MSMEs so that they are ready to receive injections of funds from the Government or in proposing additional working capital for business scale development. The target audience for this PKM activity is business actors, especially MSMEs who have been assisted by BBPKK Bandung Barat and nationally because the event is held online so that it can be accessed from anywhere. The total number of participants is 62 people with the activity time being held on December 9, 2022. The methods used in this PKM are counseling or lectures,*

tutorials, discussions, and mentoring. The results of the PKM activities obtained data that there are still many participating MSMEs that have not yet recorded, administered and archived the legality of the company and its business financial transactions. So that many MSMEs have not been able to take advantage of financing facilities to increase working capital from the Bank. After participating in this activity the participants began to be disciplined in terms of recording both business financial records and recording business legality, as well as maintaining the banking track record towards bankable MSMEs.

**Keywords:** MSMEs, Bankable

## PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Problem utama yang biasa dialami oleh UMKM salah satunya adalah permodalan (Muheramtohad, 2017). Minimnya pengetahuan mengenai akses permohonan kredit ke lembaga perbankan menyebabkan usaha kecil hanya bekerja dengan modal yang terbatas sehingga keberadaannya kurang berkembang dan belum maksimal untuk bersaing dengan usaha sejenisnya (Novitasari & Sari, 2021).

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih berkebutuhan dengan masalah klasik, yakni kerap dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (*bankable*). Padahal, secara prospek, banyak UKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (*feasible*). Akibatnya, tidak semua UMKM mampu mengakses kredit usaha rakyat (KUR). Padahal, KUR diperuntukkan kepada masyarakat kecil, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Sukmana, 2017).

Pembangunan Ekonomi Indonesia di dominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih sejak pandemi covid-19. Pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu UMKM semakin mendapatkan posisi dalam peredaran perekonomian Indonesia, sehingga UMKM pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional sudah ideal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau dalam bentuk lain bernama TKM yaitu Tenaga Kerja Mandiri adalah salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat terutama dari kalangan menengah kebawah. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program unggulan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dimana sejak tahun 2015 kegiatan pengembangan Tenaga Kerja

Rentan/Penganggur ini sudah dilakukan (Disnakertrans NTB, 2022).

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program pemberdayaan pengangguran melalui pembekalan kewirausahaan, pemberian bantuan usaha, dan pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh tenaga pendamping. Pemberian bantuan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tidak diberikan ke semua Desa, hanya beberapa Desa di setiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui instansi terkait di daerahnya yang memenuhi persyaratan yang dapat menerima bantuan program. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dilaksanakan per tahun anggaran (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020).

Terdapat 100 TKM yang berada dalam binaan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPCK) Bandung Barat merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan tenaga Kerja (Binapenta), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran

pinjaman bagi UMKM (<https://bbpkk.kemnaker.go.id/news>, n.d.).

Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah ternyata belum semuanya dapat dirasakan oleh UMKM. Banyak permasalahan yang dihadapi, secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Kegiatan ini akan fokus pada masalah finansial yang seringkali dihadapi oleh para pelaku UMKM terutama kaitannya dengan upaya penguatan UMKM pada era digital dan kemudahan akses permodalan. Berdasarkan data yang ada saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk penambahan modal kerja dari Bank atau Lembaga pembiayaan lainnya karena belum dapat memenuhi persyaratan administrasi dari pihak Bank.

Menurut (Zulfadli, 2013) suatu usaha akan mudah memperoleh bantuan modal dari kreditur jika usaha tersebut dipandang layak dan memenuhi persyaratan. Untuk itu perlunya membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan penyusunan proposal pengajuan kredit yang *bankable* (memenuhi persyaratan bank) dan *feasible* (layak) serta bagaimana prosedur pengajuan kredit ke lembaga perbankan, dengan mengajukan proposal kegiatan. Disamping itu pembekalan mengenai penyusunan pembukuan untuk usaha kecil pun tidak kalah pentingnya dan harus diberikan

Dengan adanya situasi tersebut, maka perlu adanya edukasi bagi UMKM binaan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPCK) Bandung

Barat tentang “Peningkatan Kapasitas UMKM Menuju UMKM Yang *Bankable*”. Dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM agar bisa memperoleh kemudahan dalam suntikan modal kerja dari Pemerintah, Bank atau Lembaga keuangan lainnya. Karena sistem kemitraan terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM (Cahyanti & Anjaningrum, 2017).

## TINJAUAN PUSTAKA

### UMKM

Menurut (Halim, 2020) “pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat.

Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah

setempat secara ekonomis dan menguntungkan.”

### Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit rencana atau modal kerja dan tambahan pembiayaan spekulasi yang secara eksplisit diharapkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang usaha yang bermanfaat yang usahanya dapat dicapai tetapi memiliki batasan dalam memenuhi prasyarat yang ditentukan perbankan (belum *bankable*).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan skema penjaminan oleh pemerintah. Menurut (Aziz & Wicaksono, 2017) pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% s.d 80% dari resiko kredit melalui perusahaan penjaminan yang ditunjukkan bagi calon debitur yang *feasible* namun *unbankable*. Kelebihan dalam skema ini berupa keringanan bagi calon debitur terkait dengan persyaratan jaminan yang harus dipenuhi ketika mengajukan kredit.

### *Bankable*

*Bankable* menurut (Harefa, 2015) adalah para usaha kecil yang belum pernah atau terbiasa berhubungan dengan perbankan. *Bankable* ini biasanya merupakan orang-orang yang memiliki kecakapan literasi dan keuangan dalam penggunaan produk keuangan. Banyak UMKM yang *feasible* atau secara usaha layak

namun tidak *bankable* atau tiak memenuhi kelayakan kredit.

Untuk menjadikan UMKM *bankable* dapat diperkuat dengan beberapa kriteria yaitu karakter terkait dengan sistem administrasi, kemampuan manajemen atau sumber daya manusia, modal, jaminan dan keadaan bisnis.

## PROSEDUR

Kegiatan dilakukan secara daring dikemas dalam rangkaian acara “webinar” dengan tema-tema yang saling berkaitan dalam kaitannya dengan tema utama “UMKM BERDIKARI DI ERA DIGITAL” metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah, presentasi dilanjutkan dengan diskusi mendalam tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM.

Waktu kegiatan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022. Acara dimulai pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Untuk dapat memaksimalkan pengarahan dan pendampingan berjalan lebih efektif, tema diskusi dibatasi pada bagaimana cara penyiapan dokumen-dokumen administrasi keuangan dan legalitas udaha dalam proses pengajuan pinjaman.

Khalayak sasaran yang dipilih adalah UMKM binaan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Barat khususnya dan UMKM Nasional yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan PKM. Karena acara dipublikasikan melalui media sosial

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK), makam UMKM dari seluruh Indonesia bisa mengikuti jalannya webinar sampai dengan selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Peningkatan Kapasitas UMKM Menuju UMKM yang Bankable” bekerja sama dengan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Barat dilaksanakan dalam rangkaian webinar dengan beberapa tema pembahasan yang saling berkaitan dalam upaya menuju “UMKM BERDIKARI DI ERA DIGITAL”. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at. 9 Desember 2022 secara *online* melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan berjalan lancar, diikuti oleh 62 peserta yang berasal dari beberapa kota, mayoritas adalah UMKM binaan (BBPKK) Bandung Barat, namun ada beberapa UMKM lain dari luar kota tertarik mengikuti acara PKM melihat dari unggahan pada akun instagram BBPKK.



**Gambar 1. Poster Kegiatan PKM**

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan 4 (empat) materi yang masih saling berkaitan sesuai dengan kebutuhan para UMKM saat ini. Materi yang dipertanggungjawabkan dalam laporan ini adalah Materi Pertama dengan narasumber Ibu Dila Angraini, SE., M.Ak yang memberikan pemaparan materi tentang UMKM yang *Bankable* bagaimana UMKM menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi usaha, mulai dari legalitas bisnis, laporan keuangan dan menjaga track record diri dimata bank agar dapat memperoleh kemudahan dalam proses pengajuan tambahan modal kerja.

Melalui kegiatan ini peserta PKM diharapkan dapat memahami bahwa *Bankable* artinya nasabah telah dianggap memenuhi persyaratan Bank. Dimana yang dituju untuk

memenuhi persyaratan Bank tersebut adalah individu-individu baik sebagai nasabah debitur, maupun nasabah tabungan atau deposito, atau masyarakat luas yang memerlukan layanan Perbankan lainnya. Namun yang menjadi masalah bukan dari sisi perbankan, melainkan kelayakan usaha memperoleh fasilitas kredit dari perbankan atau disebut dengan "*bankable*". Pelaku usaha dinyatakan "*bankable*" apabila memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha. Sebaliknya, jika tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, maka UMKM tersebut termasuk dalam nasabah *unbankable*. Syarat untuk bisa *bankable*:

1. Dokumentasi usaha yang jelas

Mengapa UMKM harus memiliki izin usaha? Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh jika UMKM memiliki izin usaha, antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan ketika melakukan usaha
- b. Memperoleh pendampingan ketika mengembangkan usaha
- c. Lebih mudah untuk mengajukan kerjasama
- d. Memperoleh legalitas UMKM resmi

Kelengkapan administrasi perizinan ini sangat penting, dalam menjalankan bisnis, akan lebih tenang jika semua persyaratan-persyaratan perizinan dipenuhi, karena tidak lagi ada kekhawatiran akan berurusan dengan

pihak-pihak berwajib karena bisnis dijalankan secara illegal atau belum memiliki izin.

## 2. *Cash flow* yang positif

*Cash flow* atau arus kas adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran akan menciptakan *cash flow* yang positif. Sebaliknya *cash flow* akan menjadi negatif apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.

Untuk mengetahui jumlah uang masuk dan keluar ini, UMKM sudah mulai harus memisahkan antara pengeluaran/ pemasukan pribadi dengan usahanya. Lalu kemudian mulai membuat pencatatan atas pengeluaran dan pemasukan bulanan, melalui aplikasi-aplikasi akuntansi yang sudah banyak tersedia di internet atau bisa dengan menggunakan ms.excel. Dengan adanya data-data keuangan ini, maka UMKM dapat menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan bisnis yang harus diambil untuk peningkatan skala usaha.

## 3. *Track record* yang positif

*Track record* baik yaitu terkait dengan perbankan yaitu pembayaran kreditnya dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 dan 2, dan juga terkait dengan kepemilikan NPWP serta pembayaran pajaknya baik, dan tidak masuk dalam daftar hitam dari OJK. UMKM harus lebih berhati-hati dengan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Atas setiap

kewajiban harus dipenuhi sesuai dengan waktu jatuh temponya, agar nama UMKM di mata bank, tetap terjaga baik untuk kemudahan proses pinjaman berikutnya. Karena sekali masuk daftar blacklist Bank Indonesia, maka UMKM akan direpotkan dengan proses administrasi untuk memulihkan *track record* kita.



Gambar 2. Berfoto Bersama peserta

## KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Peningkatan Kapasitas UMKM “Menuju UMKM yang *Bankable*”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi ini dinilai cukup berhasil karena peserta aktif mengikuti diskusi dan tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan ini diharapkan mampu untuk memberikan edukasi kepada UMKM untuk dapat mempersiapkan diri menjadi UMKM yang *bankable*, dan dapat dijadikan sebagai kebijakan dalam memutuskan untuk mengambil pinjaman

kepada perbankan dalam pengembangan modal usaha

Dengan adanya sambutan yang baik dari UMKM dan keinginan yang kuat untuk lebih tahu tentang *bankable*, maka disarankan bagi Universitas Pamulang (UNPAM) untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa dan dapat dilaksanakan secara tatap muka.

## REFERENSI

- Aziz, A., & Wicaksono, E. (2017). *Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.420>
- Cahyanti, M. M., & Anjaningrum, W. D. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan Di Kota Malang*. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 73–79. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.50>
- Disnakertrans NTB. (2022). Kurangi pengangguran, DISNAKERTRANS NTB bekali TKM dengan skill & manajemen usaha. DISNAKERTRANS NTB. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/kurangi-pengangguran-disnakertrans-ntb-bekali-tkm-dengan-skill-menejemen-usaha/>
- Halim, A. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Harefa, M. (2015). *Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Propinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah*. *Kajian*, 20(4), 343–366. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/634>
- Muheramtohad, S. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Novitasari, N., & Sari, M. A. (2021). *Pelatihan Penyusunan Proposal Kredit Yang Bankable dan Feasible Untuk Para Pelaku Usaha Kecil di Kota Depok*. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i1.471>
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). *Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 15–34.
- Sukmana, Y. (2017). Masalah Klasik UMKM, "Feasible tetapi Tidak "Bankable." *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2017/02/14/210000726/masalah.klasik.umkm.feasible.tetapi.tidak.bankable.?page=all>
- Zulfadli. (2013). Feasible dan Bankable Kunci Sukses UMKM. *Okebana.Com*. <http://www.okebana.com/2013/04/feasible-dan-bankable-kunci-sukses-umkm.html>